

ABSTRAK

Tersangka tanggal 17 juli 2018 ditangkap setelah dilakukan pengeledahan oleh penyidik Direktorat Narkoba Polda Jabar di apotek kayas Jalan Raya Lawanggada No. 65 Kota Cirebon didapati 2 (Dua) bungkus pelastik bening berisikan obat merek zenith berisikan 371 butir yang tidak memiliki ijin edar dan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kahsiat atau kemanfaatan dan mutu. Perbuatan tersangka diduga melanggar Pasal 197 Jo Pasal 196 Jo Pasal 198, Undang-Undang Nomor 36 2009 Tentang Kesehatan, Balai Peengawasan Obat dan Makanan (selajutnya disingkat BPOM) Bandung Jawa Barat, obat merek Zenith yang beratnya sebanyak 1213,98 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, dan acetaminophen termasuk dalam obat terlarang menurut Permenkes pada tanggal 29 maret 2018 UU Kesehatan No 7 Tahun 2018 obat zenith resmi menjadi gol 1 narkotika permasalahanya kewenangan apa yang dimiliki penyidik dalam Tindak Pidana Kesehatan, sedangkan perkara ini sudah berjalan 1 tahun lamanya. Berdasarkan Kasus seperti itu, penulis mengajukan permasalahan hukumnya, kewenangan apa yang dimiliki oleh penyidik Polda Jabar dalam Tindak Pidana Kesehatan, dan tindakan apa yang dapat dilakukan penyidik Narkotika Polda Jabar dalam Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/A/648/VII/2018/Polda Jabar.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative kualitatif yang menitikberatkan pada penelitian data kepustakaan (data sekunder) guna mengetahui ketentuan apa yang dapat dilakukan penyidik untuk tindak pidana kesehatan, khususnya adalah peredaran gelap obat-obatan

Penyidik Narkotika Polda Jabar telah melakukan penyidikan dalam dugaan tindak pidana peredaran obat gelap berdasarkan UU Kesehatan dikarenakan penanganannya terhadap perkara ini seharusnya dilakukan oleh PPNS di bidang kesehatan, yaitu penyidik PPNS di Dinkes Cirebon dimana keberadaan penyidik Polisi hanya sebatas Korwas saja. Karena menurut KUHAP, penyidik Polisi terhadap perkara yang tunduk diatas kewenangannya dalam kewenangan PPNS terkait, maka yaitu penyidik polisi berkedudukan sebagai penyidik utama yaitu hasil penyelidikan dan penyidikan PPNS tersebut baru diserahkan ke penyidik Polisi untuk diajukan ke pihak penuntutan, Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh penyidik Narkotika Polda Jabar adalah menyerahkan berkas perkara ini ke PPNS Dinkes Cirebon untuk dilakukan penyidikan.

ABSTRACT

The suspect on 17 July 2018 was arrested after a search was carried out by an investigator from the Directorate of Narcotics at the West Java Regional Police at the pharmacy in Jalan Raya Lawanggada No. 65 Kota Cirebon found 2 (two) clear pelastic packages containing zenith brand medicines containing 371 items that did not have marketing authorization and did not meet the standards of security requirements, accuracy or usefulness and quality. The alleged act violates Article 197 Jo Article 196 Jo Article 198, Law Number 36 2009 Regarding Health, Food and Drug Monitoring Center (hereinafter abbreviated as BPOM) Bandung West Java, Zenith brand drug which weighs 1213.98 grams contains active ingredient Karisoprodol and acetaminophen included in illegal drugs according to Minister of Health on March 29, 2018 Health Act No. 7 of 2018 Zenith drugs officially become a narcotics goal, the problem is what authority investigators have in Health Crime, while this case has been running for 1 year. Based on such cases, the authors propose legal issues, what authority is owned by the West Java Regional Police investigator in Health Crime, and what actions can be carried out by Narcotics investigators of the West Java Regional Police in the Police Report Case Number: LP / A / 648 / VII / 2018 / West Java Regional Police.

The research method used is a normative qualitative juridical approach that focuses on library data research (secondary data) in order to find out what provisions investigators can do for health crimes, specifically the illicit circulation of drugs.

The Narcotics Investigator of the West Java Regional Police has conducted an investigation into the alleged criminal acts of illicit drug trafficking under the Health Law because the handling of this case should be carried out by PPNS in the health sector, namely PPNS investigators in the Cirebon Health Office where the police investigators are limited to Korwas. Because according to the Criminal Procedure Code, police investigators against matters that are subject to their authority within the PPNS authority are related, ie police investigators are preoccupied as the main investigators, namely the results of investigations and investigations of the PPNS are only submitted to police investigators to be submitted to prosecutors. The West Java Regional Police is submitting this case file to the Cirebon District Health Office PPNS for investigation.